

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Kantor Kesehatan Pelabuhan Surabaya Kelas I

Istilah karantina dan quarantine berasal dari bahasa latin QUADRAGINTA atau bahasa perancis QUARANTA yang berarti 40 hari, maksudnya untuk mencapai suatu pelabuhan tujuan, kapal harus ada di laut selama 40 hari.

Pada tahun 1348 lebih dari 60 juta orang penduduk dunia meninggal karena penyakit "PES" (Black Death). Pada tahun 1348 pelabuhan venesia sebagai salah satu pelabuhan yang terbesar di eropa melakukan upayah karantina dengan cara menolak masuknya kapal yang datang dan daerah yang terjangkit pes serta terhadap kapal yang dicurigai terjangkit penyakit pes. Pada tahun 1383 di Marseille, Perancis, ditetapkan UU Karantina yang pertama dan didirikan Station Karantina yang pertama.

Pada tahun 1911 di Indonesia. Pes masuk melalui pelabuhan tanjung perak surabaya. Pada tahun 1911 diduga dimulainya tindakan karantina di Indonesia. ORDONANTIE .

Penanganan masa kemerdekaan, sekitar tahun 1949-1950 pemerintah RI membentuk 5 pelabuhan karantina, yaitu ; pelabuhan karantina kelas 1, tanjung priok dan sabang, pelabuhan karantina kelas II : surabaya dan semarang serta pelabuhan karantina kelas III : cilacap.

Pada tahun 1959 Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 1959 tentang penyakit karantina perkembangan selanjutnya lahir undang-

undang nomor 1 tahun 1962 tentang karantina laut dan UU no 2 tahun 1962 tentang karantina udara.

Pada tahun 1970, terbit SK Menkes No. 1025/DD/Menkes, tentang pembentukan dinas kesehatan pelabuhan laut (DKPL) sebanyak DKPL & dinas kesehatan pelabuhan udara (DKPU) sebanyak 12 DKPU. Salah satunya adalah DKPL tanjung perak. Baik DKPL maupun DKPU non eselon. Kegiatan DKPL dan DKPU baik teknis maupun administratif meski satu kota tetapi tetap terpisah.

SK Menkes Nomor 147/MenkesIV/78, DKPL dan DKPU dilebur menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan dan pembinaan teknisnya beradiah dibawah Bidang Desenan Kantor Wilayah Depkes dimana pimpinan KKP adalah III B.

Berdasarkan SK Menkes Nomor 147/MenkesIV/78 KKP terdiri atas 10 KKP Kelas A dan 34 KKP kelas B. Dimana Kantor Kesehatan Pelabuhan – pelabuhan surabaya termasuk kategori kelas A.

Sejak penerapan undang-undang otonomi daerah, otoritas kesehatan ditingkat provinsi yang bernama Kanwil Depkes harus dilebur kedalam struktur Dinas Kesehatan Provinsi. Peraturan pemerintah tentang pembagian kewenangan mengamanatkan bahwa kekarantinaan sebagai wewenang pemerintah pusat. Tahun 2004 terbit SK Menkes No 265/Menkes/SK/III/2004 tentang organisasi & tata kerja KKP yang baru. KKP digolongkan menjadi:

- a) KKP Kelas I (eselon II B) :2 KKP
- b) KKP Kelas II (eselon III A) : 14 KKP (termasuk KKP Surabaya)
- c) KKP Kelas III (eselon III B) : 29 KKP

Pada tahun 2008 dilakukan lagi revisi sekaligus mencabut permenkes 265 tahun 2004 dengan permenkes 356/MENKES/PER/IV/2008. Sejak berlakunya peraturan ini, maka di lingkungan Departemen kesehatan terdapat 7 (tujuh) KKP Kelas I, 21 (dua puluh satu) KKP kelas II, dan 20 (dua puluh) KKP Kelas III . berdasarkan permenkes ini kantor kesehatan pelabuhan surabaya naik dari Kelas II menjadi Kelas I.

Peraturan menteri kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 juga telah mengalami perubahan sebagian isinya melalui permenkes nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011. Dengan perubahan terakhir ini jumlah KKP menjadi 49 dengan rincian terdapat 7 (tujuh) KKP Kelas I, 21 (dua puluh satu) KKP kelas II, dan 20 (dua puluh) KKP Kelas III serata 1 (satu) KKP Kelas IV.

2.2 Visi dan Misi KKP Kelas I Surabaya

- **Visi**

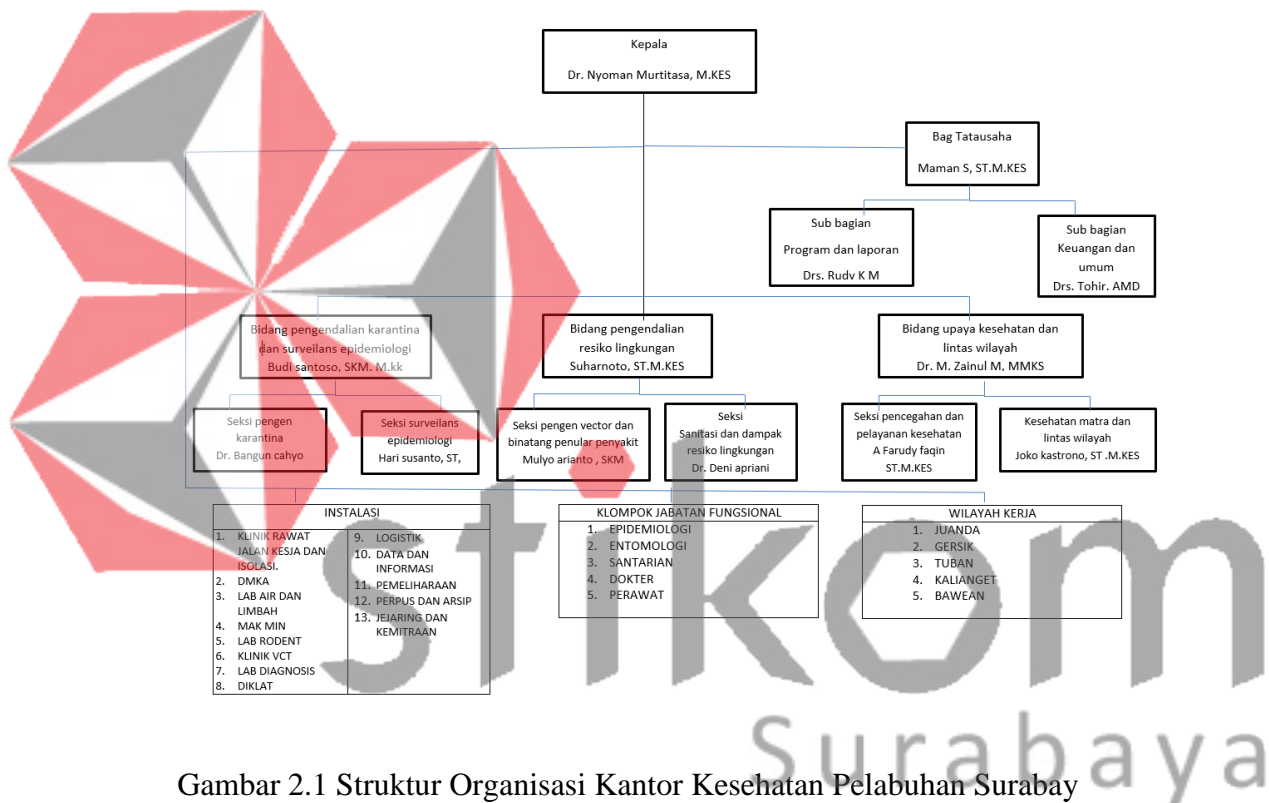
Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berlandaskan gotong royong.

- **Misi**

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan berdemokrasi berlandasan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.3 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Surabaya

